

## **PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KOTA BENGKULU**

**Ria Anggraeni Utami**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
J.l WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu  
Email: riaanggraeniutami@yahoo.com, ria\_unib@yahoo.com*

---

### **Abstract**

*One provision in the juvenile justice system that must be implemented by the probation officer as a case study of social (social studies), and it will be considered in the juvenile justice system. However, the existence of a probation officer is less of a concern, as if the child's role in the handling of the problem is the police, prosecutors, judges and prisons alone. This study discussed the role of the probation officer in the juvenile justice system and their constraints in doing their part in juvenile justice system. This study used the empirical approach to social law as a descriptive analysis. The results of this study show that the role of the probation officer in the juvenile justice system is a probation officer conducts research community, seeking information about children that could be done with the interview or collect data with home visits. This is done to make the social case study report become useful as a recommendation to the investigator or to assist the judge in the court to make the right decisions for the child. Probation officers also conduct supervision or guidance for the child during the examination by the police, prosecutors and judges. This is to prevent violations of children's rights. There are two constraints faced by the probation officer, as constraints in the case studies on social, and constraints in the implementation of the juvenile justice system. This study suggests to improve coordination between law enforcement agencies with the probation officer that will protect the interests of the child better.*

**Key words:** *Experimental Officer, Social Case Study, Juvenile Justice System*

### **Abstrak**

Salah satu ketentuan dalam sistem peradilan anak yang harus dilaksanakan oleh petugas percobaan sebagai studi kasus sosial (penelitian sosial), dan itu akan dipertimbangkan dalam sistem peradilan anak. Namun, keberadaan petugas percobaan masih kurang perhatian, seolah-olah peran dalam penanganan masalah anak adalah polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan saja. Penelitian ini membahas tentang peran petugas percobaan dalam sistem peradilan anak dan kendala petugas percobaan dalam pelaksanaan peran mereka dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan hukum sosial sebagai analisis deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran petugas percobaan dalam sistem peradilan anak adalah petugas percobaan melakukan penelitian masyarakat, mencari informasi tentang anak yang bisa dilakukan dengan wawancara atau mengumpulkan data dengan kunjungan rumah. Hal ini dilakukan untuk membuat laporan studi kasus sosial

yang berguna sebagai rekomendasi kepada penyidik atau untuk membantu hakim di pengadilan untuk membuat keputusan yang tepat untuk anak. Petugas percobaan juga melakukan pengawasan atau bimbingan bagi anak selama pemeriksaan oleh polisi, jaksa dan hakim. Hal ini untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak. Ada dua kendala yang dihadapi oleh petugas percobaan, seperti kendala dalam pelaksanaan studi kasus sosial, dan kendala dalam implementasi dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan koordinasi antara penegak hukum dengan petugas percobaan bahwa lebih melindungi kepentingan anak.

**Kata Kunci:** Petugas Percobaan, Studi Kasus Sosial, Sistem Peradilan Anak

## PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, termasuk ketika anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana negara harus tetap memberikan perlindungan kepadanya. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut anak yang di bawah umur pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>1</sup>

Seiring perkembangan dan kebutuhan, Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap, terutama anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di

internasional pun telah ada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Masalah penanganan perkara anak yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak yang dapat diajukan ke peradilan pidana yaitu berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun namun belum menikah (kawin). Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 1/PUU-VII/2010 memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, anak yang berusia 8 tahun hingga 18 tahun diberikan tanggungjawab pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. MK berpendapat batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat 2 UUD 1945.<sup>2</sup> Atau dengan kata lain MK memutuskan bahwa batas bawah usia

1. Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005 hlm. 3.4.

2. <http://www.detiknews.com/read/2011/02/24/212305/1578835/10/mk-usia-anak-dapat-dipidana-minima-12-tahun?nhi diakses pada 10 Juni 2011>.

anak yang bisa diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah 12 tahun.

Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum ini C.E.G. Sunaryati Hartono menyatakan: "Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhadapan dengan hukum perlu ditangani secara seksama atau dilakukan dengan memprioritaskan perlindungan dan kepentingan terbaik anak melalui suatu sistem peradilan anak yang dimana merupakan suatu substansi hukum yang mengatur tentang peradilan anak dan struktur hukum menyangkut badan atau lembaga yang menangani peradilan anak yaitu terdiri dari badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat."<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan adanya kewajiban bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian (perlindungan) yang khusus terhadap anak-anak yang berada di dalam kondisi tertentu termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, bagi anak-anak yang terpaksa dihadapkan pada proses peradilan, maka dibutuhkan suatu lembaga yang mendampingi atau mengawasi mereka dalam proses pidana mulai tahap awal proses penyidikan sampai sidang.

Di Indonesia, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, lembaga yang dimaksud adalah Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) di mana peran dan fungsinya dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu dari Petugas Kemasyarakatan.<sup>4</sup> Pembimbing Kemasyarakatan ini yang mengupayakan perlindungan bagi anak dalam proses peradilan anak agar mendapatkan perlindungan sehingga hak-hak mereka dapat terjamin di mata hukum.

Salah satu ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap peradilan anak harus dilaksanakan dengan adanya petugas dari balai pemasyarakatan (BAPAS) yakni Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembuat litmas (penelitian kemasyarakatan) anak yang akan menjadi pertimbangan dalam proses sistem peradilan pidana anak. Akan tetapi keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian, seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak bermasalah itu hanyalah Polisi, Penuntut Umum, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Begitu pentingnya keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam peradilan anak, hal ini tergambarkan dalam pernyataan Hawnah Schaft, seperti yang dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto:

"Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas BAPAS) daripada hakimnya. Peradilan anak yang

3. C.E.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 56.

4. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm.. 28.

tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin menjadi sia-sia.”<sup>5</sup>

Di dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhannya sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah agar pembimbing kemasyarakatan dapat membantu hakim dalam memutuskan nasib anak tersebut, dimana situasi-situasi yang digambarkan di dalam penelitian kemasyarakatan bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim yakni pertimbangan sosiologis. Berdasarkan pernyataan permasalahan, maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimanakah peranan Laporan

Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu? (2) Apakah kendala pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak di Kota Bengkulu?

### METODE PENELITIAN

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud memberikan gambaran tentang peranan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Bengkulu. Menurut Soerjono Soekanto suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.<sup>6</sup> Tujuan lain dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.<sup>7</sup>

Jenis data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara. Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang dianggap kompeten memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti. Pihak yang berkompeten ini antara lain Pembimbing Kemasyarakatan di Balai

5. Alamsyah, *Perlindungan Anak Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2009, hlm. 59.

6. Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

7. J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4.

Pemasyarakatan Bengkulu, Penyidik di Kepolisian Resor Bengkulu, Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu), dan narapidana anak (anak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yakni peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum dan kriminologi yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan atau elektronik. Data yang diperoleh dari penelitian akan dijabarkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **P e r a n a n P e m b i m b i n g K e m a s y a r a k a t a n D a l a m S i s t e m P e r a d i l a n P i d a n a A n a k D i K o t a B e n g k u l u**

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perlindungan anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia lakukan.

Perlindungan terhadap kepentingan anak diusahakan dengan memberikan rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.<sup>8</sup> Sebagai bentuk dari sistem peradilan bagi anak mengutamakan kesejahteraan anak, penegak hukum diberikan kebebasan

membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan. Penyidik, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal.

Di dalam sistem peradilan pidana anak terdapat kekhususan dalam penyidik anak misalnya dengan adanya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang dalam pelaksanaan tugasnya (dalam penyidikan) tidak memakai perlengkapan formal seperti baju dinas polisi ketika melakukan penyidikan pada pelaku dewasa, selain itu juga terdapat Jaksa Anak, Hakim Anak dan juga adanya Pembimbing Kemasyarakatan Anak yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga yang memiliki peran besar dalam penanganan perkara anak yaitu dimulai sejak awal adanya pembuatan Litmas yang menjadi syarat penanganan anak sebagaimana diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.<sup>9</sup> Dimana Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) ini dilakukan dan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Mengenai penyelenggaraan Pengadilan Anak secara khusus ini dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan: "dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing

8. Lutiarti Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal (Delinkuen) dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu, Bengkulu; Universitas Bengkulu, 2007, hlm. 2.
9. Eva Achjani Zulfa, Ringkasan Draft Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Program Restorative Justice dalam Peradilan Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2011, hlm. 32.

tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin menjadi sia-sia.”<sup>5</sup>

Di dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhannya sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah agar pembimbing kemasyarakatan dapat membantu hakim dalam memutuskan nasib anak tersebut, dimana situasi-situasi yang digambarkan di dalam penelitian kemasyarakatan bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim yakni pertimbangan sosiologis. Berdasarkan pernyataan permasalahan, maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimanakah peranan Laporan

Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu? (2) Apakah kendala pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak di Kota Bengkulu?

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud memberikan gambaran tentang peranan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Bengkulu. Menurut Soerjono Soekanto suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.<sup>6</sup> Tujuan lain dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.<sup>7</sup>

Jenis data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara. Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang dianggap kompeten memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti. Pihak yang berkompeten ini antara lain Pembimbing Kemasyarakatan di Balai

5. Alamsyah, *Perlindungan Anak Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2009, hlm. 59.

6. Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

7. J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4.

Pemasyarakatan Bengkulu, Penyidik di Kepolisian Resor Bengkulu, Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu), dan narapidana anak (anak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yakni peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum dan kriminologi yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan atau elektronik. Data yang diperoleh dari penelitian akan dijabarkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **P e r a n a n P e m b i m b i n g Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Bengkulu**

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perlindungan anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia lakukan.

Perlindungan terhadap kepentingan anak diusahakan dengan memberikan rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.<sup>8</sup> Sebagai bentuk dari sistem peradilan bagi anak mengutamakan kesejahteraan anak, penegak hukum diberikan kebebasan

membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan. Penyidik, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal.

Di dalam sistem peradilan pidana anak terdapat kekhususan dalam penyidik anak misalnya dengan adanya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang dalam pelaksanaan tugasnya (dalam penyidikan) tidak memakai perlengkapan formal seperti baju dinas polisi ketika melakukan penyidikan pada pelaku dewasa, selain itu juga terdapat Jaksa Anak, Hakim Anak dan juga adanya Pembimbing Kemasyarakatan Anak yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga yang memiliki peran besar dalam penanganan perkara anak yaitu dimulai sejak awal adanya pembuatan Litmas yang menjadi syarat penanganan anak sebagaimana diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.<sup>9</sup> Dimana Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) ini dilakukan dan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Mengenai penyelenggaraan Pengadilan Anak secara khusus ini dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan: "dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing

8. Lutiarti Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal (Delinkuen) dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu, Bengkulu; Universitas Bengkulu, 2007, hlm. 2.

9. Eva Achjani Zulfa, Ringkasan Draft Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Program Restorative Justice dalam Peradilan Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2011, hlm. 32.

Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan". Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka peran Pembimbing Kemasyarakatan berkaitan dengan proses peradilan anak ini mempunyai dasar hukum yang lebih kuat, antara lain:

1. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Pasal 33 yang menyatakan Petugas kemasyarakatan terdiri dari :
  - a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
  - b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
  - c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
3. Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :
  - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;
  - b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
4. Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
5. Pasal 55 yang menyatakan bahwa dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.
6. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
7. Pasal 57 yang menyatakan bahwa:
  - 1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau



- orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- 2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
8. Pasal 58 yang menyatakan bahwa:
- 1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
  - 2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
9. Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dimana penjelasan Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mengenai Pembimbing Kemasyarakatan, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan ini lebih dikuatkan. Dalam Pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip *restorative justice* yang diharapkan

menjadi alternatif penyelesaian perkara terhadap pelaku anak nakal ini. Di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga dinyatakan bahwa dalam melakukan diversifikasi haruslah mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, apapun hasil atau kualitas hasil penelitian kemasyarakatan tersebut. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengambil putusan. Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga anak yang bersangkutan.

Adapun isi Penelitian Kemasyarakatan terhadap Klien Anak jika kita lihat dari Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah berisi:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak.
- b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Mengenai tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 33 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu bertugas:

1. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal,

baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;

2. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu mengenai tugas Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, di mana Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di dalam LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana dengan syarat atau pidana latihan kerja sebagai pengganti pidana denda atau dijatuhi tindakan; dan

- e. Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Bengkulu, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu serta Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Bengkulu diketahui bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan terdapat di seluruh tahapan penanganan perkara pidana anak, dimulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Walaupun di dalam kenyataannya Pembimbing Kemasyarakatan ini seringkali hanya diikutsertakan ketika proses penyidikan dan persidangan saja. Walaupun Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut hanya dibuat satu kali untuk satu perkara anak terhadap satu pelaku anak, dalam artian dimana Penelitian Kemasyarakatan yang sama digunakan dalam setiap tahap pemeriksaan dalam penyelesaian perkara pidana, namun pada hakekatnya Penelitian Kemasyarakatan ini memiliki peran yang berbeda dalam setiap tahap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Bengkulu, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu serta Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Bengkulu diketahui

bahwa fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan di masing-masing tahap pemeriksaan suatu perkara pidana anak adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Penyidikan

Menurut Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan proses penyidikan. Setelah dilakukan tahapan-tahapan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan hasil laporan tersebut kepada pihak kepolisian. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidik dapat mempergunakan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak. Berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan, penyidik mempertimbangkan apakah akan meneruskan apakah akan meneruskan proses pidana ke tahap penuntutan atau menghentikan proses pemeriksaan tersebut yang dapat dilakukan *restorative justice* terhadap suatu perkara anak. Terhadap perkara pidana anak yang tidak didiversi ditingkat penyidikan, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari hasil

penyidikan yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Dalam hal ini salah satu kelengkapan dari BAP adalah laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam tahap ini Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran sangat penting untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Sehingga Penyidik dapat mempergunakan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak.

Menurut pandangan penyidik, penyidik anak meminta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut dan lingkungan sosialnya dalam hal ini termasuk keluarga dan sekolahnya, yang dimulai dengan anak tersebut dibawa ke Balai Kemasyarakatan untuk diwawancarai. Penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan adalah agar Pembimbing Kemasyarakatan bisa mempunyai faktor pertimbangan secara sosiologis dalam memutuskan apakah anak tersebut dan perkara pidananya memang harus melalui proses sistem peradilan pidana atau bisa dilakukan tindakan lain untuk menyelamatkan nasib anak tersebut dari stigma atau cap 'penjahat' yang pasti akan melekat pada anak tersebut apabila anak tersebut

berubah statusnya menjadi terdakwa atau juga narapidana atau mantan narapidana, dimana tindakan lain tersebut dapat penyidik lakukan dengan memakai 'diskresi' yang mereka miliki, atau juga dapat mengembangkan program *restorative justice* atau juga diversifikasi yang penguatannya terdapat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik tidak dapat melakukan tindakan sendiri tanpa mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Karena pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan tidaklah sembarangan, karena sebagai peneliti kemasyarakatan, sudah pasti Pembimbing Kemasyarakatan tidak ingin pertimbangannya akan menjerumuskan anak kepada nasib yang lebih buruk tetapi bersungguh-sungguh memperhatikan pembinaan anak demi kepentingan anak.

## 2. Tahap Penuntutan

Peranan dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan serta Penelitian Kemasyarakatan dalam tahap penuntutan dari perkara anak ini adalah bahwa pada saat penyidik kepolisian menyerahkan berkas penyidikan kepada kejaksaan, maka haruslah disertai dengan menyerahkan laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai syarat kelengkapan berkas penyidikan tersebut. Sehingga, jaksa penuntut umum juga bisa memeriksa berkas laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat

surat dakwaan (proses penuntutan) atau apakah akan menghentikan proses pemeriksaan terhadap anak tersebut. Dimana mengenai hal ini, penuntut umum sesuai dengan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mempunyai kewenangan menutup perkara demi kepentingan umum. Jadi, apabila jaksa penuntut umum tersebut berpendapat bahwa dalam kasus ini bisa diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal maka jaksa penuntut umum yang menangani perkara pidana tersebut bisa menggunakan wewenang untuk menghentikan perkara.

## 3. Tahap persidangan

Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Di dalam Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan diberikan sebelum sidang dibuka, hal ini agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu jika didasarkan pada Pasal 59 ayat (2) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi, Pembimbingan Kemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi sebagai salah satu syarat sah dalam proses

peradilan anak nakal ini. Dimana dengan Penelitian Kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan lakukan dan buat maka menjadi faktor pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan yang tepat dan bijak untuk anak tersebut.

Dengan demikian, Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak dilakukan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan. Selain itu guna kepentingan perlindungan khusus terhadap pelaku anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga dalam perkara anak, pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara bukanlah semata-mata hanya pertimbangan hukum, akan tetapi digunakan pula pertimbangan yang bersifat sosial dengan maksud agar tindakan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan harus diungkapkan dan disajikan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, agar penegak hukum tidak keliru dalam bertindak dan atau juga dalam membuat suatu putusan.

Dalam membantu penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang berfungsi untuk

memberikan gambaran tentang anak pelaku tindak pidana tersebut dan memberikan kesimpulan serta saran agar dapat membantu penegak hukum dan juga Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan para penegak hukum tersebut, misalnya saja untuk bahan pertimbangan Penyidik untuk mengambil tindakan *diversi* (pengalihan) suatu perkara anak dengan tujuan agar anak tersebut terhindar dari hukuman formal. Dalam hal membantu hakim di persidangan anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan wajib disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai saran dan masukan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk anak tersebut, akan tetapi bukan untuk mempengaruhi dan mengurangi wewenang Hakim di dalam mengambil keputusan.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Bengkulu, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu serta Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Bengkulu diketahui bahwa Peranan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap di dalam sistem peradilan pidana anak terkait dengan perlindungan anak adalah:

1. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan, dimana Pembimbing Kemasyarakatan tersebut melakukan pencarian informasi tentang anak pelaku

pidana tersebut yang dapat dilakukan melalui wawancara maupun pengumpulan data melalui *home visit*. Hal tersebut dilakukan untuk membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang berguna sebagai bahan rekomendasi penyidik untuk melakukan diskresi ataupun juga membantu Hakim di persidangan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk anak tersebut.

2. Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan tugas pengawasan atau pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut selama pemeriksaan mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa:

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Apabila kita lihat dari bunyi Penjelasan Pasal 25 tersebut maka nampak bahwa Pembimbing Kemasyarakatan lewat laporan penelitian kemasyarakatan yang disusunnya mempunyai peranan yang besar dalam menentukan nasib anak nakal tersebut. Mengingat pentingnya Pembimbing Kemasyarakatan dan

penelitian kemasyarakatan seharusnya suatu perkara pidana anak sudah dari awal didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Bahwa dalam Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak pada proses peradilan anak, kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan bukan sekedar pendamping yang membuat Litmas saja tetapi seharusnya berperan sebagai *Guidance* dan *counselor* yang memiliki intervensi; Litmas dalam menentukan Program Pembinaan Narapidana dan Anak didik, Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya juga berperan sebagai *Adviser* dan *counselor* dengan membuat *case record* sejak tahap awal masa Admisi Orientasi kemudian ke tahap lanjutan sampai kepada tahap akhir.<sup>10</sup> Sehingga pemidanaan untuk anak yang sebenarnya pengenaan pidana yang merupakan *ultimum remedium* dapat diberlakukan. Jadi, pemidanaan menurut teori Utilitarian dari Jeremy Bentham yaitu mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pelaku dapat benar-benar bisa terwujud dalam sistem peradilan pidana anak ini.

### **Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu**

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugas dan kewenangannya menemui berbagai kendala dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini banyak penyebabnya, terutama karena Pembimbing Kemasyarakatan 'terjun

10. <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/berita-utama/195-penerapan-hak-asasi-manusia-di-balai-pemasyarakatan> diakses pada 24 Desember 2011.

langsung' ke lapangan dalam artian melakukan *home visit* ke lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Karena dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pembuatan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan membutuhkan banyak dukungan baik dalam bentuk Sumber Daya Manusia maupun Sumber sarana dan prasarana termasuk juga biaya operasional yang digunakan dalam pelaksanaan dan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.

Dalam penjabaran hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Bengkulu diketahui beberapa kendala tersebut adalah:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan kurang merasa leluasa dalam melakukan wawancara terhadap anak, karena kadangkala tidak diberi ruangan khusus untuk wawancara, dimana Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara di ruang kerja, sehingga terganggu dengan suara keras orang yang bekerja dan penyidik pun berada di sekitar Pembimbing Kemasyarakatan yang mewawancarai anak tersebut, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan kurang konsentrasi dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dan klien anak pun takut memberikan jawaban yang sebenarnya. Selain itu pihak penyidik terkadang masih sering memantau atau mengawasi jalannya pendampingan klien atau tersangka anak tersebut ketika anak tersebut diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Terbatasnya pendidikan atau pengetahuan anak tersebut sehingga menyulitkan Pembimbing Anak dalam bertanya dan mendapatkan jawaban yang diperlukannya, sehingga dapat menghabiskan banyak waktu dalam melakukan wawancara, terlebih terhadap klien anak yang tidak bisa atau tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia.
- c. Aparat pemerintah setempat (Ketua RT/RW) seringkali tidak berada di tempat, terutama saat hari kerja, ketika *home visit* begitupun orang tua klien seringkali tidak berada di tempat ketika hari kerja karena mereka bekerja.
- d. Kadang orang tua klien anak tidak mau diwawancarai karena takut, karena tidak semua orang tua anak nakal tersebut mengerti tentang Bapas, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih terhadap orang tua klien anak tersebut.
- e. Kadang Pembimbing Kemasyarakatan bingung dengan saran yang akan mereka berikan kepada klien anak tersebut. Misalnya saja apabila terhadap klien anak tersebut akan diberikan saran seperti akan mengembalikan anak tersebut kepada orangtua akan tetapi ternyata anak tersebut sudah tidak ada lagi (meninggal). Selain itu terbatasnya pendidikan yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut juga menyebabkan keterbatasan saran yang bisa diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- f. Adanya koreksi dari Kepala Seksi Bimbingan Klien anak sampai dengan Kepala Balai Pemasyarakatan sebenarnya dilakukan agar mendapatkan kualitas Litmas yang baik dan benar, akan tetapi kadangkala dirasakan bahwa walaupun hal itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas Litmas tersebut sehingga dengan adanya koreksi maka hasilnya akan sempurna kadangkala memperlambat kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaporkan Litmas itu sendiri.
- g. Kurangnya Sumber Daya Manusia. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang sedikit menyebabkan terbatasnya tenaga untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Di Bapas Bengkulu jumlah Pembimbing Kemasyarakatan Anak hanya sebanyak 10 orang dengan jumlah Kabupaten/ Kota sebanyak 8 Kabupaten/ Kota dengan jarak tempuh yang jauh.
- h. Sarana dan Prasarana Penelitian Kemasyarakatan yang kurang memadai. Disamping unsur pelaksana utama (Pembimbing Kemasyarakatan), hal lain yang tidak dapat diabaikan dan berperan besar dalam menunjang kerja bagi Penelitian Kemasyarakatan adalah keadaan sarana dan prasarana penunjang kerja itu sendiri. Kurangnya sarana misalnya computer yang akan digunakan untuk menyusun laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, sehingga untuk melaksanakan tugasnya tersebut Pembimbing Kemasyarakatan terpaksa untuk membeli laptop untuk menunjang kerja mereka. Selain itu kurangnya kendaraan operasional yang bisa digunakan untuk ke lapangan sehingga menyebabkan Pembimbing Kemasyarakatan memakai sendiri kendaraan pribadi mereka, baik itu untuk *home visit* maupun ketika menghadiri sidang anak tersebut. Sehingga dengan kurangnya kendaraan operasional menjadi kendala sehingga kurang efektifnya kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan.
- i. Terbatasnya dana atau anggaran operasional untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Dana atau anggaran operasional untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan berbeda-beda tergantung waktu dan jarak tempuh. Adapun biaya tersebut juga termasuk biaya operasional Pembimbing Kemasyarakatan dalam menghadiri sidang anak tersebut di Pengadilan, yang sudah tentu sidang tersebut akan lebih dari satu kali sidang. Dan juga itu termasuk biaya pengerjaan dan penyusunan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah Pembimbing Kemasyarakatan tersebut lakukan. Dana tersebut sangatlah minim, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan sering 'nombok' atau tekor. Dan harus mengeluarkan uang pribadi untuk dapat melakukan kunjungan atau melakukan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi keperluan biaya transportasi dan akomodasi dalam melakukan kunjungan Penelitian Kemasyarakatan saja, tetapi juga



diperuntukkan bagi biaya penyusunan laporan Penelitian Kemasyarakatan termasuk penggandaannya. Dengan anggaran yang minim tersebut, maka tak dapat dihindari, pihak-pihak yang diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat terbatas, misalnya saja seperti pihak sekolah dan pihak korban hampir tidak pernah diteliti secara dalam oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- j. Keterbatasan waktu dan kurangnya kerjasama antara penegak hukum. Pihak penyidik baru meminta nasihat Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan pada saat anak tersebut sudah memasuki tahapan penyidik oleh penyidik, sehingga hal ini membuat Pembimbing Kemasyarakatan tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan penelitian. Karena masa penyidikan anak yang terbatas dan proses hukum terhadap anak tersebut pun harus dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga penyidik tidak bisa mencari alternatif saran dan rekomendasi lain seperti *diversi* atau juga *restorative justice* karena keterbatasan waktu tersebut. Pada tingkat penuntutan, Jaksa belum memanfaatkan fungsi Bapas, terutama Pembimbing Kemasyarakatan. Masih banyak pemberitahuan sidang yang dilakukan secara mendadak dan menganggap kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan seakan-akan hanya menjadi formalitas belaka. Dalam hal kurangnya kerjasama antara penegak hukum, hal ini kurangnya kerjasama antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Kejaksaan pada tahap

penuntutan dan hakim pada tahap persidangan. Dimana jaksa kurang komunikatif terutama saat memberi informasi mengenai jadwal sidang. Dimana tidak jarang Pembimbing Kemasyarakatan baru mengetahui jadwal sidang pada hari sidang tersebut akan dilaksanakan, dimana kadangkala Pembimbing Kemasyarakatan sedang melakukan Penelitian Kemasyarakatan sehingga tidak bisa mendampingi persidangan anak pelaku tindak pidana.

- k. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan seakan-akan hanya formalitas belaka. Kadangkala Pembimbing Kemasyarakatan merasa Jaksa kurang peduli dan memahami peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan anak tersebut. Hal tersebut nampak dari sikap Jaksa yang kurang tanggap apabila Pembimbing Kemasyarakatan tidak hadir dalam persidangan. Padahal sudah menjadi tanggungjawab Jaksa untuk memanggil Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir dalam persidangan. Selain itu masih ada beberapa hakim yang melakukan persidangan anak tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa mengkonfirmasi ketidakhadiran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.

Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian, seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak bermasalah itu hanyalah Polisi, Penuntut Umum, Hakim dan

petugas Lembaga Pemasyarakatan, padahal penelitian kemasyarakatan yang Pembimbing Kemasyarakatan lakukan itu merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan nasib anak tersebut di dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana yang ia jalani. Hakim terkadang hanya membutuhkan Litmas saja tanpa membutuhkan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan. Padahal di dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, atau wali diwajibkan hadir dalam persidangan anak. Hal ini juga nampak dari keterangan 5 orang narapidana anak (anak pidana) yang diwawancarai di Lapas Bengkulu. Dimana mereka tidak mengetahui secara jelas apa itu Pembimbing Kemasyarakatan. Mereka hanya mengetahui bahwa ada petugas yang mewawancarai mereka untuk menanyakan tentang kronologis peristiwa pidana dan juga menanyakan tentang kehidupan mereka, tanpa mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. Bahkan 3 dari 5 anak tersebut mengatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan hanya sekali datang ketika mereka sidang. Bahkan tahanan anak mengatakan bahwa dalam 2 kali sidang yang telah dijalaninya belum pernah sekalipun didampingi Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi anak tersebut tidak mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan sehingga hampir bisa dipastikan ketika mereka diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut mereka tidak terlalu terbuka menceritakan apa yang terjadi sehingga hal ini pasti akan

menyulitkan mereka dan merugikan mereka sendiri.

Terkait perlu tidaknya laporan hasil litmas, sebagaimana Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberikan gambaran bahwa dengan adanya hasil litmas tersebut, hakim yang mengadili perkara tersebut memperoleh gambaran yang tepat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya karena putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan sehingga hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan tersebut akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk menghindari suatu perkara anak yang tidak berdasarkan penelitian pemasyarakatan atau juga tidak didasarkan adanya pembimbing kemasyarakatan maka dalam proses peradilan pidana anak, koordinasi antara penegak hukum harus dilaksanakan secara efektif dan maksimal. Dimana Bapas harus diposisikan sebagai partner atau mitra bagi komponen sistem peradilan pidana lainnya (penegak hukum lainnya). Dengan adanya koordinasi maka penegak hukum dalam sistem peradilan anak tidak hanya bertindak dengan hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif saja tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor

non hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan anak tersebut. Akan tetapi untuk suatu perkara anaka yang tidak berdasarkan litmas dan sudah berupa putusan maka yang bisa dilakukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang maka putusan tersebut batal demi hukum.

## KESIMPULAN

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap di dalam sistem peradilan pidana anak adalah: pertama Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan, dimana Pembimbing Kemasyarakatan tersebut melakukan pencarian informasi tentang anak pelaku pidana tersebut yang dapat dilakukan melalui wawancara maupun pengumpulan data melalui home visit. Hal tersebut dilakukan untuk membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang berguna sebagai bahan rekomendasi penyidik untuk melakukan diskresi ataupun juga membantu Hakim di persidangan sehingga

dapat mengambil keputusan yang tepat untuk anak tersebut. Kedua, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan tugas pengawasan atau pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut selama pemeriksaan mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

2. Dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, terdapat kendala-kendala. Kendala tersebut adalah dalam Pelaksanaan Tugas Penelitian Kemasyarakatan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan kurang merasa leluasa dalam melakukan wawancara terhadap anak pihak (penyidik terkadang masih sering memantau atau mengawasi jalannya pendampingan klien atau tersangka anak), terbatasnya pendidikan atau pengetahuan anak, orang tua klien anak dan aparat pemerintah setempat (Ketua RT/RW) seringkali tidak berada di tempat ketika Pembimbing Kemasyarakatan

melakukan home visit, kadang orang tua klien anak tidak mau diwawancarai karena takut, Pembimbing Kemasyarakatan terkadang bingung dengan saran yang akan mereka berikan kepada klien anak, adanya koreksi dari Kepala Seksi Bimbingan Klien anak sampai dengan Kepala Balai Pemasyarakatan, kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, sarana dan prasarana Penelitian Kemasyarakatan yang kurang memadai, terbatasnya dana atau anggaran operasional untuk

melakukan Penelitian Kemasyarakatan, adanya keterbatasan waktu, kurangnya kerjasama dan koordinasi antara penegak hukum, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan seakan-akan hanya formalitas dan masih ada beberapa hakim yang melakukan persidangan anak tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa mengkonfirmasi ketidakhadiran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alamsyah, 2009**, *Perlindungan Anak Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Bengkulu, Universitas Bengkulu.
- Lutiarti, 2007**, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal (Delinkuen) dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu*, Bengkulu, Universitas Bengkulu.
- Mulyadi, Lilik., 2005**, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono., 1986.**, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sunaryati Hartono. C.E.G, 1991.**, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Supramono, Gatot, 2005**, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan.
- Supranto, J., 2003**, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Zulfa, Eva Achjani, 2011.**, *“Ringkasan Draft Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Program Restorative Justice dalam Peradilan Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981** *Tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara 1981/ 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** *Tentang Perlindungan Anak* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997** *Tentang Pengadilan Anak*, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012** *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,*  
Lembaran-Negara Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5332

<http://www.detiknews.com/read/2011/02/24/212305/1578835/10/mk-usia-anak-dapat-dipidana-minimal-12-tahun?nhl>.

<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/berita/bapas-dan-lapas-anak/111-bapas-klas-ii-bogor/192-peranan-bapas-dalam-menangani-anak-serta-hubungannya-dengan-pihak-penegak-hukum-terkait>.